



DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

ILKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Tahun 2015

Jl. Surapati No. 1, Telp. (0365) 41210, Fax. (0365) 41010
Negara - Bali



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Jalan Surapati Nomor 1 Telp. (0365) 41210 Negara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 53 / TAN / 2016

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jemberana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jemberana tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jemberana Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana;
17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud dalam diktum KESATU merupakan laporan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana.

KETIGA

- KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana terlampir merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara

pada tanggal 24 Maret 2016

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana,

Ir. I Ketut Wiratma.

NIP. 19570501 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/instansi dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai laporan.
6. Para Camat se-Kabupaten Jembrana.
7. A r s i p.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas asung kerta wara nugrahaNya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman penyusunan LKjIP yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun LKjIP pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

Kami menyadari LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan laporan ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Negara, 24 Maret 2016
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Jembrana,

Ir. I Ketut Wiratma
Pembina Utama Muda
NIP. 19570501 199201 1 006



DAFTAR ISI

	Hal.
SK PENETAPAN LKjIP 2015	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Umum	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Sumber Daya Manusia	9
1.5 Visi dan Misi	10
1.6 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan Dinas	13
2.2 Sasaran Dinas	13
2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2015	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	30
3.2 Realisasi Anggaran.....	73
BAB IV. PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	74
2. Saran-Saran	74
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
1. Peranjan Kinerja	
2. Cascading Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman penyusunan LKjIP yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember, menyebutkan bahwa, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagai Dinas Daerah dan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Jember. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember Tahun 2015 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK), dan perbandingan pencapaian/evaluasi kinerja antara tahun 2014 dan 2015. Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.



1.2 DASAR HUKUM

LKjIP Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember Tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 45).
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 53);
- p. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember;
- q. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 45).
- r. Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.



1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember, maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan konsep, sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan, operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang program, evaluasi dan pelaporan.

2.3 Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penatausahaan keuangan, anggaran dan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



3. Kepala Bidang Pertanian

Bidang Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

3.1 Kepala Seksi Produksi

Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan produksi serta pengkajian dan pengembangan teknologi tanaman pangan dan hortikultura.

3.2 Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Seksi pengolahan dan pemasaran hasil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

3.3 Kepala Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan pengendalian organisme pengganggu tanaman, sarana pengendalian dan pestisida komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

4. Kepala Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang perkebunan.

4.1 Kepala Seksi Produksi

Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan produksi serta pengkajian dan pengembangan teknologi perkebunan.

4.2 Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan Pengolahan dan Pemasaran Hasil komoditas perkebunan.



4.3 Kepala Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan pengendalian organisme pengganggu tanaman, sarana pengendalian dan pestisida komoditas perkebunan.

5. Kepala Bidang Peternakan

Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang budidaya peternakan dan kesehatan hewan.

5.1 Kepala Seksi Produksi

Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan produksi, penyebaran dan pengembangan ternak serta pengkajian dan pengembangan teknologi peternakan.

5.2 Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

5.3 Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner .

6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Bidang Sarana Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang sarana prasarana, sumberdaya dan alat mesin pertanian, perkebunan dan peternakan.

6.1 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian

Seksi Sarana Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan sarana prasarana, sumberdaya dan alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura.



6.2 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan

Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan sarana prasarana, sumberdaya dan alat mesin peternakan, keswan dan kesmavet.

6.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan

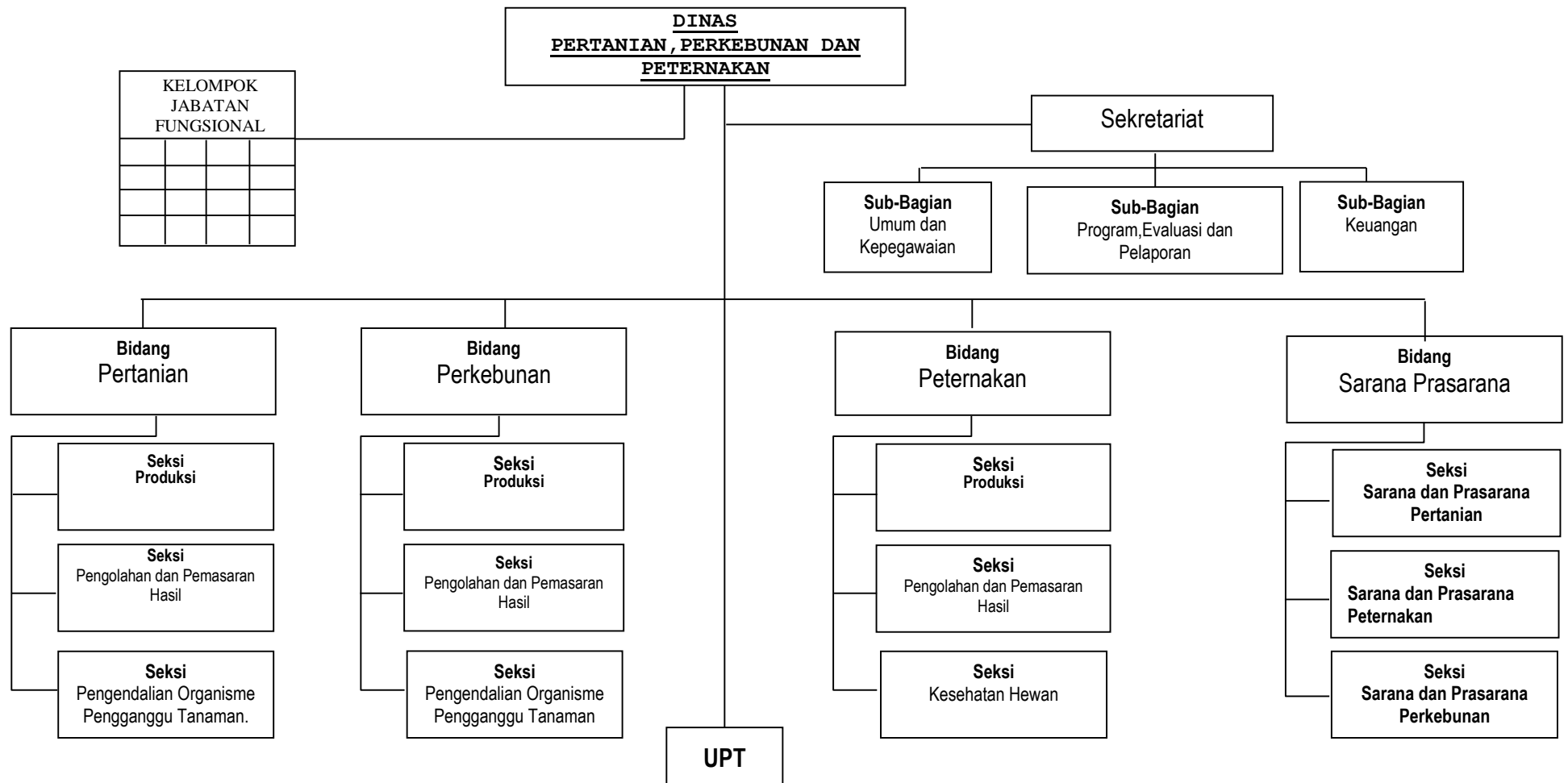
Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan sarana prasarana, sumberdaya dan alat mesin perkebunan.

7. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



BAGAN 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBRANA





1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data Tahun 2015, jumlah pegawai yang ada di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember sebanyak 130 orang, terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak : 99 orang.
2. Pegawai Harian/Kontrak Daerah sebanyak : 24 orang.
3. Pegawai Kontrak Pusat sebanyak : 7 orang.

Dilihat dari komposisi pendidikannya, pegawai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember terdiri atas : S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 44 orang, Diploma sebanyak 25 orang, SLTA sebanyak 52 orang, SMP sebanyak 2 orang dan SD sebanyak 1 orang, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas laki-laki sebanyak 114 orang dan perempuan sebanyak 16 orang. Berdasarkan komposisi jabatan, maka Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember memiliki 23 orang Pejabat Struktural terdiri dari :

1. Kepala Dinas : 1 Orang.
2. Sekretaris : 1 Orang.
3. Kepala Bidang : 4 Orang.
4. Kepala UPTD : 1 Orang
5. Kasi/Kasubag : 16 Orang.

Selain jabatan struktural, juga didukung dengan Jabatan Fungsional sebanyak 53 orang, yaitu 43 orang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian, 6 orang Petugas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan 4 orang Petugas Medik Veteriner, serta Staf sebanyak 54 orang. Perkembangan jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan yang ada di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	1
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	4	3
5.	Pembina (IV/a)	12	13	13
6.	Penata Tingkat I (III/d)	33	34	35
7.	Penata (III/c)	16	22	22
8.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	23	13	12
9.	Penata Muda (III/a)	4	4	2
10.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-



No.	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
11.	Pengatur (II/c)	-	6	7
12.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	5	1	1
13.	Pengatur Muda (II/a)	2	2	1
14.	Juru Tingkat I (I/d)	1	-	-
15.	Juru (I/c)	1	1	1
16.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-
17.	Juru Muda (I/a)	-	-	1
18.	Tenaga Honorer/ Kontrak Daerah	24	24	24
19.	Tenaga Kontrak Pusat	7	7	7
JUMLAH		130	131	130

1.5 VISI DAN MISI

Perumusan visi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran serta mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka visi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember disusun sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG BERORIENTASI AGRIBISNIS DAN KETAHANAN PANGAN BERFALSAFAH TRI HITA KARANA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam visi tersebut perlu dijelaskan pengertiannya sebagai berikut :

1. **Tewujudnya Pertanian, Perkebunan dan Peternakan berorientasi Agribisnis dan Ketahanan Pangan** bermakna bahwa pembangunan yang ingin diwujudkan dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling mendukung secara terintegrasi dan bersinergi dengan menerapkan kaedah-kaedah agribisnis mulai dari sub sistem produksi sampai ke sub sistem pengolahan dan pemasaran hasil, tetapi tetap memberikan perhatian bagi terjaminnya ketersediaan bahan pangan utama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di kabupaten Jember.



2. ***Berfalsafah Tri Hita Karana***, bermakna bahwa dalam pembangunan pertanian senantiasa berpedoman kearifan lokal yang bersumber pada agama dan adat masyarakat Bali yang telah terbukti keunggulannya sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, yaitu berupa konsep menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam lingkungan dalam kekuasaan Tuhan Yang Maha.
3. ***Kesejahteraan Masyarakat*** bermakna bahwa, pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Jembrana.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan misi, yakni sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Selanjutnya sebagai implementasi dari visi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana, maka misi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan juga sejalan dengan Misi Pembangunan Kabupaten Jembrana, khususnya ***Misi Kedua*** yaitu meningkatkan perekonomian daerah, melalui optimalisasi potensi basis, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun misi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Sumber daya Pertanian secara optimal dan memantapkan ketahanan pangan.
2. Mendorong pengembangan agribisnis (agroindustri) untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi pedesaan.
3. Meningkatkan kapasitas/kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan petani.
4. Menjaga keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan peranan ketata usaha untuk mendukung terwujudnya visi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

1.6 PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Revitalisasi pertanian merupakan salah satu prioritas utama pembangunan jangka menengah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, terutama di pedesaan, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sekaligus dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan daya saing hasil pertanian. Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, dengan 3 (tiga) fokus prioritas, terdiri dari:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri.
- b. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian.
- c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian.



Permasalahan utama dalam revitalisasi bidang pertanian yang masih harus dihadapi adalah :

1. Menurunnya debit air irigasi yang diakibatkan oleh anomaly iklim, serta sarana jaringan irigasi belum seluruhnya diperbaiki.
2. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang perlu ditingkatkan kualitasnya.
3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian;
4. Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, sehingga gizi kurang berimbang.
5. Masih adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
6. Masih rendahnya permodalan petani.
7. Nilai jual hasil pertanian sangat tergantung posisi tawar penebas.
8. Masih rendahnya respon masyarakat terhadap penyakit ternak dan kurang efektifnya petani ternak terhadap cara-cara pemeliharaan ternak sesuai teknis



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategis harus memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Aspek Strategis meliputi; visi, misi, tujuan, sasaran, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA), sebagai berikut;

1. Visi

Visi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember adalah :

**“TERWUJUDNYA PERTANIAN YANG BERORIENTASI AGRIBISNIS
DAN KETAHANAN PANGAN BERFALSAFAH TRI HITA KARANA
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT“.**

Penjelasan Visi :

Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam visi tersebut perlu dijelaskan pengertiannya sebagai berikut :

4. **Tewujudnya Pertanian, Perkebunan dan Peternakan berorientasi Agribisnis dan Ketahanan Pangan** bermakna bahwa pembangunan yang ingin diwujudkan dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling mendukung secara terintegrasi dan bersinergi dengan menerapkan kaedah-kaedah agribisnis mulai dari sub sistem produksi sampai ke sub sistem pengolahan dan pemasaran hasil, tetapi tetap meberikan perhatian bagi terjaminnya ketersediaan bahan pangan utama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di kabupaten Jember.
5. **Berfalsafah Tri Hita Karana** bermakna, bahwa dalam pembangunan pertanian senantiasa berpedoman kearifan lokal yang bersumber pada agama dan adat masyarakat Bali yang telah terbukti keunggulannya sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang yaitu



berupa konsep menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam lingkungan dalam kekuasaan Tuhan Yang Maha.

6. **Kesejahteraan Masyarakat** bermakna bahwa, pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Jembrana.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan misi, yakni sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Selanjutnya sebagai implementasi dari Visi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana maka, Misi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan juga sejalan dengan Misi Pembangunan Kabupaten Jembrana, khususnya **Misi kedua** yaitu Meningkatkan perekonomian daerah, melalui optimalisasi potensi basis, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Misi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana sebagai berikut:

6. Memanfaatkan Sumber daya Pertanian secara optimal dan memantapkan ketahanan pangan.
7. Mendorong pengembangan agribisnis (agroindustri) untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi pedesaan.
8. Meningkatkan kapasitas/kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan petani.
9. Menjaga keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan.
10. Meningkatkan peranan ketata usaha untuk mendukung terwujudnya visi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

3. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun, guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan



adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perkebunan dan peternakan Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 2011-2016

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Pangan Hortikultura
			Prosentase Penyediaan Benih Padi Unggul
			Prosentase Penyediaan Pupuk



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4
			Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani
			Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh
		Menurunnya serangan pertanian OPT	Rasio Lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida
			Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit
			Prosentase tingkat serangan OPT
		Meningkatnya pendapatan petani	Prosentase harga gabah perolehan petani sesuai dengan HET
2.	Meningkatkan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Meningkatnya Produksi Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan
			Prosentase Penyediaan Benih Unggul Perkebunan
			Prosentase Penyediaan Pupuk
			Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani Perkebunan
		Menurunnya serangan Perkebunan OPT	Rasio Lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida
			Prosentase Kelompok Perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit
			Prosentase tingkat serangan OPT
3.	Meningkatkan Populasi dan Produksi Peternakan	Meningkatnya Populasi Ternak	Prosentase Peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan
			Prosentase Peningkatan Kelompok tani ternak
			Prosentase Peningkatan Usaha Peternakan
			Prosentase Kelompok yang dilatih dalam teknologi tepat guna bidang peternakan
		Menurunnya tingkat kesakitan hewan/ternak	Peningkatan Jumlah Vaksinasi hewan/ternak



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4
		Meningkatnya Mutu Produk Asal Hewan	Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Produk Asal Hewan di Pasar
			Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Antomortem dan Postmortem pada RPH
			Prosentase Pengawasan Obat
4.	Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana pertanian	Penyediaan Infrastruktur dan alat mesin pertanian

4. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi tersebut di atas, strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang Akuntabel dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
2. Membangun koordinasi dan sinergisitas dalam menciptakan berkinerja yang efektif dan efisien.
3. Berkomitmen dalam penyelenggaraan isu-isu strategis yang telah ditentukan

Selanjutnya strategi ini menjadi kesepakatan seluruh Bidang yang berada dibawah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, sehingga wajib menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 PENETAPAN KINERJA

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember Tahun 2011-2016. Dalam Rencana Kerja ini, terdapat program-program yang strategis yang memuat informasi tentang : 1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang



bersangkutan(Sasaran Strtegis); 2) Indikator Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama; dan 3) Target Capaiannya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuanyang telah ditetapkan dalam Renstra yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya.

Indikator Kinerja Utama ini memuat aspek prioritas pembangunan dan penjelasan tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sebagaimana telah direncanakan Renstra Tahun 2011-2016 dan dukungan APBD Tahun 2015.

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Jembrana ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, berisi program utama, sasaran yang hendak dicapai dengan target indicator *output* dan atau *outcome* pada tabel terlampir.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Pencapaian Indikator Sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Jalan Surapati No.1 Telp. (0365) 41210, Fax. (0365) 41010
N E G A R A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. I Ketut Wiratma.**
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jemberana.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **I Putu Artha.**
Jabatan : Bupati Jemberana.
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

Negara, 2 Pebruari 2015
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Peternakan Kabupaten Jemberana,

IR. I KETUT WIRATMA
PEMBINA TK.I
NIP. 19570501 199203 1 006



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBRANA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Pangan Hortikultura	63.009 ton
		Prosentase Penyediaan Benih Padi Unggul	100%
		Prosentase Penyediaan Pupuk	100%
		Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani	75%
		Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh	75%
2	Menurunnya serangan OPT pertanian	Rasio Lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida	450 Ha
		Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit	3%
		Prosentase tingkat serangan OPT	10%
3	Meningkatnya pendapatan petani	Prosentase harga gabah perolehan petani sesuai dengan HET	100%
4	Meningkatnya Produksi Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan	3.112 ton
		Prosentase Penyediaan Benih Unggul Perkebunan	100%
		Prosentase Penyediaan Pupuk	100%
		Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani	75%
5	Menurunnya serangan OPT Perkebunan	Rasio Lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida	34 Ha
		Prosentase Kelompok Perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit	30%
		Prosentase tingkat serangan OPT	10%
6	Meningkatnya Populasi Ternak	Prosentase Peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan	100%
		Prosentase Peningkatan Kelompok tani ternak	10%
		Prosentase Peningkatan Usaha Peternakan	10%
		Prosentase Kelompok yang dilatih dalam teknologi tepat guna bidang peternakan	5%



7	Menurunnya tingkat kesakitan hewan/ternak	Peningkatan Jumlah Vaksinasi hewan/ternak	20%
8	Meningkatnya Mutu Produk Asal Hewan	Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Produk Asal Hewan di Pasar	10%
		Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Antomortem dan Postmortem pada RPH	100%
		Prosentase Pengawasan Obat Hewan	10%
9	Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana pertanian	Penyediaan Infrastruktur dan alat mesin pertanian Pertanian	171 unit/paket

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Rp 6,894,772,000.00
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp 431,000,608.20
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan	Rp 981,044,676.00
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Rp 1,058,000,000.00
5	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Rp 55,000,000.00
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp 152,780,000.00
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp 1,182,485,000.00
8	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Rp 10,000,000.00

Bupati Jembrana,

I PUTU ARTHA

Negara, 2 Pebruari 2015
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Jembrana,

IR. I KETUT WIRATMA
Pembina Tingkat I
NIP. 19570501 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Jalan Surapati No.1 Telp. (0365) 41210, Fax. (0365) 41010
N E G A R A

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. I Ketut Wiratma.**
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **I Putu Artha.**
Jabatan : Bupati Jembrana.
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

Negara, 22 September 2015
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Peternakan Kabupaten Jembrana,

IR. I KETUT WIRATMA
PEMBINA TK.I
NIP. 19570501 199203 1 006



**PERUBAHAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBRANA**

SASARAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2 Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	3	4	5	6
	Produksi Tanaman Pangan Hortikultura	63.009 ton	Produksi Tanaman Pangan Hortikultura	63.009 ton
	Prosentase Penyediaan Benih Padi Unggul	100%	Prosentase Penyediaan Benih Padi Unggul	100%
	Prosentase Penyediaan Pupuk	100%	Prosentase Penyediaan Pupuk	100%
	Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani	75%	Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani	75%
	Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh	75%	Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh	75%
	Rasio Lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida	450 Ha	Rasio Lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida	450 Ha
	Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit	3%	Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit	3%
	Prosentase tingkat serangan OPT	10%	Prosentase tingkat serangan OPT	10%
	Prosentase harga gabah perolehan petani sesuai dengan HET	100%	Prosentase harga gabah perolehan petani sesuai dengan HET	100%



Meningkatnya Produksi Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan	3.112 ton	3.112 ton
	Prosentase Penyediaan Benih Unggul Perkebunan	100%	100%
	Prosentase Penyediaan Pupuk	100%	100%
	Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani	75%	75%
Menurunnya serangan OPT Perkebunan	Rasio Lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida	34 Ha	34 Ha
	Prosentase Kelompok Perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit	30%	30%
	Prosentase tingkat serangan OPT	10%	10%
Meningkatnya Populasi Ternak	Prosentase Peningkatan populasi ternak melalui inseminasi Buatan	100%	100%
	Prosentase Peningkatan Kelompok tani ternak	10%	10%
	Prosentase Peningkatan Usaha Peternakan	10%	10%
	Prosentase Kelompok yang dilatih dalam teknologi tepat guna bidang peternakan	5%	5%
Menurunnya tingkat kesakitan hewan / ternak	Prosentase peningkatan jumlah vaksinasi hewan/ternak	20%	20%



Meningkatnya Produksi Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan	3.112 ton	Produksi Tanaman Perkebunan	3.112 ton
	Prosentase Penyediaan Benih Unggul Perkebunan	100%	Prosentase Penyediaan Benih Unggul Perkebunan	100%
Menurunnya serangan OPT Perkebunan	Prosentase Penyediaan Pupuk	100%	Prosentase Penyediaan Pupuk	100%
	Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani	75%	Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani	75%
	Rasio Lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida	34 Ha	Rasio Lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida	34 Ha
	Prosentase Kelompok Perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit	30%	Prosentase Kelompok Perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit	30%
	Prosentase tingkat serangan OPT	10%	Prosentase tingkat serangan OPT	10%
Meningkatnya Populasi Ternak	Prosentase Peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan	100%	Prosentase Peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan	100%
	Prosentase Peningkatan Kelompok tani ternak	10%	Prosentase Peningkatan Kelompok tani ternak	10%
	Prosentase Peningkatan Usaha Peternakan	10%	Prosentase Peningkatan Usaha Peternakan	10%
Menurunnya tingkat kesakitan hewan / ternak	Prosentase Kelompok yang dilatih dalam teknologi tepat guna bidang peternakan	5%	Prosentase Kelompok yang dilatih dalam teknologi tepat guna bidang peternakan	5%
	Prosentase peningkatan jumlah vaksinasasi hewan/ternak	20%	Prosentase peningkatan jumlah vaksinasasi hewan/ternak	20%



Meningkatnya Mutu Produk Asal Hewan	Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Produk Asal Hewan di Pasar	10%	Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Produk Asal Hewan di Pasar	10%	Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Produk Asal Hewan di Pasar	10%
	Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Produk Asal Hewan di Pasar	10%	Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Produk Asal Hewan di Pasar	10%	Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Produk Asal Hewan di Pasar	10%
	Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Antomortem dan Postmortem pada RPH	100%	Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Antomortem dan Postmortem pada RPH	100%	Prosentase Peningkatan Pemeriksaan Antomortem dan Postmortem pada RPH	100%
	Prosentase Pengawasan Obat Hewan	10%	Prosentase Pengawasan Obat Hewan	10%	Prosentase Pengawasan Obat Hewan	10%
Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana pertanian	Penyediaan Infrastruktur dan alat mesin pertanian	171 unit/paket	Penyediaan Infrastruktur dan alat mesin pertanian	130 unit/paket	Penyediaan Infrastruktur dan alat mesin pertanian	130 unit/paket

PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN		KET		SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	
	Rp		APBD		Rp	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Rp	6,894,772,000.00	APBD		Rp	19,302,245,000.00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	431,000,608.20	APBD		Rp	431,000,608.20
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan	Rp	981,044,676.00	APBD		Rp	981,044,676.00
Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Rp	1,058,000,000.00	APBD		Rp	1,058,000,000.00
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Rp	55,000,000.00	APBD		Rp	55,000,000.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	152,780,000.00	APBD		Rp	152,780,000.00
Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan	Rp	1,182,485,000.00	APBD		Rp	1,182,485,000.00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Rp	10,000,000.00	APBD		Rp	10,000,000.00



Negara, 22 September 2015
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Jemberana,

IR. I KETUT WIRATMA
Pembina Tingkat I
NIP. 19570501 199203 1 006

Bupati Jemberana,

I PUTU ARTHA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian Visi Misi dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya (SAKIP), dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pengukuran kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari *input* hingga *outcomes* sebagai berikut:

1). Input

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator *input* adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. *Input* adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* sedangkan indikator *input* adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola *input* tersebut, indikator kinerja *input* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang



menggambarkan mengenai (1) kuantitas *input*, (2) kualitas *input*, dan (3) kehematan dalam menggunakan *input*.

2). *Proses*

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3). *Output*

Indikator *output* memberikan gambaran mengenai *output* dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator *input*, indikator *output* sebaiknya juga dibedakan dengan *outputnya* sendiri. *Output* adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator *output* adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*.

4). *Outcome*

Indikator *outcome* memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara *output* dan hasil tidak dikaitkan secara langsung.

Indikator kinerja *outcome* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah *output* / kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah *output* / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah *output* / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah *output* / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah *output* / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah *output* / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah *output* / kegiatan selesai.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :



- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

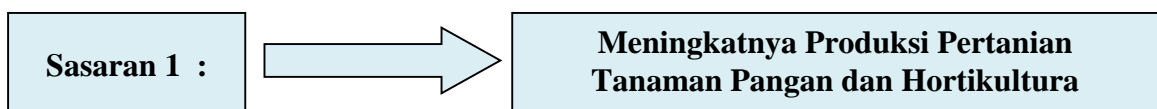
- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

3.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Capaian kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap IKU Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan kinerja yang direncanakan. Serta menguraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan analisis capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 2011-2016 untuk pencapaian visi – misi dan tujuan sebagai berikut :



Sektor pertanian sebagai penunjang utama kehidupan masyarakat Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan pesat. Sektor ini juga menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Peningkatan produksi pertanian di Wilayah Kabupaten Jembrana lebih



dititikberatkan padapeningkatan produktivitas dibandingkan dengan penambahan luas lahan. Pemerintah daerah dalam melakukan perhitungan produksi tanaman padi menggunakan cara yang dikenal sebagai ubinan. Hasil ubinan menentukan tingkat produksi secara keseluruhan. Produksi tanaman pangan merupakan hasil produksi yang dihasilkan per satuan luas panen dengan satuan ton. Produktivitas tanaman digunakan untuk menghitung produksi komoditas tanaman pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman antara lain; 1) Penyiapan lahan, 2) Penggunaan bibit/varietas unggul yang digunakan, 3) Cara budidaya yang benar, 4) Pemupukan yang berimbang, 5) Cara panen yang tepat, 6) Pengolahan pasca panen yang baik bagus. Semua hal tersebut diatas berhubungan dengan teknologi, dimana teknologi pertanian harus mendorong peningkatan produktivitas.

Sasaran meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura didukung dengan indikator kinerja utama, sebagai berikut :

1.1 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Produksi Tanaman pangan dan hortikultura adalah target dan realisasi selama 1 (satu) tahun. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.:

Tabel 4.
Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	ton	54.205	60.944	112,43	59.757	70.074	117,26	63.009	65.298	103,63

Program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan dengan Kegiatan Pengembangan Balai Benih/ Bibit Pertanian Terpadudengan indikator tahun 2015 adalah terlaksananya perbanyak benih padi unggul dan kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura dengan indikator tahun 2015 adalah meningkatnya produksi hortikultura berupa semangka dan melon yang kegiatannya pemberian bantuan kepada kelompok tani subak berupa saprodi melon dengan luas 3 Ha dan saprodi semangka dengan luas 3 ha.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor



penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemberian bantuan berupa benih padi unggul dan benih hortikultura kepada masyarakat di Kabupaten Jember. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, baru tercapai sebesar 103,63%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.
Perbandingan IKU Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	ton	225,93	361,48	160	140,25	361,48	160

Keberhasilan pencapaian IKU Prosentase Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura didukung dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan dan melaksanakan Kegiatan Pengembangan Balai Benih/ Bibit Pertanian Terpadu. Pagu anggaran sebesar Rp. 424.390.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 408.900.300,- (96,35%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 15.489.700,- (3,65 %) dan kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura. Pagu anggaran sebesar Rp. 179.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 176.393.500,- (98,16%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 3.306.500,- (1,84 %)



Kegiatan Panen Raya Padi di Subak Pecelengan dan Pedukuhan Desa Mendoyo Daging Tukad Kec. Jember

Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 6.
Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan
Untuk Mendukung IKU Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan					
	- Kegiatan Pengembangan Balai Benih/ Bibit Pertanian Terpadu	424.390.000	100	408.900.300	96,35	15.489.700
	- Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura	179.700.000	100	176.393.500	98,16	3.306.500
J U M L A H		604.090.000	100	585.293.800	96,89	18.796.200



Kegiatan Penanaman Semangka dan Melon melalui Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura

1.2 Prosentase Penyediaan Benih Padi Unggul

Prosentase penyediaan benih unggul adalah prosentase jumlah benih padi unggul berbanding luas tanam. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.



Tabel 7.

Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Prosentase penyediaan benih padi unggul	ton	215,300	354,480	164,64	234,900	375,84	160,00	225,925	371,480	164,43

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penggunaan benih pada setiap tahun lebih tinggi bila dibandingkan dengan sasaran. Kalau dilihat realisasi penggunaan benih per tahun adalah berfluktuatif, karena hal ini tergantung dari realisasi tanam padi yang berhubungan langsung dengan penggunaan benih. Jenis benih unggul yang digunakan petani mayoritas varitas ciherang, cigelis, inpari, IR 64 dan varitas unggul lainnya.

Dalam rangka memotivasi petani dalam penggunaan benih unggul Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan benih unggul melalui Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi, untuk tahun anggaran 2015 volume bantuan benih unggul sebanyak 15.100 kg. Program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan dengan Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi dengan indikator tahun 2015 adalah tersalurnya bantuan benih padi unggul sebanyak 15.100 kg kepada kelompok Tani/subak se kecamatan di kabupaten Jembrana.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemberian bantuan berupa benih padi unggul kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase Penyediaan Benih Padi Unggul, baru tercapai sebesar 105,12 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 8.
Perbandingan IKU Prosentase Penyediaan Benih Padi Unggul dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase Penyediaan Benih Padi Unggul	Persen	225,925	311,480	164,43	296,300	311,480	105,12

Keberhasilan pencapaian IKU Prosentase Penyediaan Benih Padi Unggul didukung dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan dan melaksanakan Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi. Pagu anggaran sebesar Rp. 207.531.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.632.300,- (96,19%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 7.898.700,- (3,81 %). Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9.
Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan Untuk Mendukung IKU Prosentase Penyediaan Benih Padi Unggul Tahun 2015

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan - Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi	207.531.000	100	199.632.300	96,19	7.898.700
J U M L A H		207.531.000	100	199.632.300	96,19	7.898.700

1.3 Prosentase Penyediaan Pupuk

Prosentase penyediaan Keragaman penggunaan pupuk di dalam pelaksanaan intensifikasi padi tahun 2013, 2014 dan 2015 , sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 10.****Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Prosentase penyediaan pupuk	ton	2.830	3.014,20	106,51	2.164	3.088,60	142,73	3.270	3.072,75	93,96

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015 terjadi Kenaikan 1,94 %, program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini bersumber dari anggaran /dana (TP / dekon) dengan indikator tahun 2015 adalah tersalurnya pupuk pada kelompok Tani/subak se kecamatan di kabupaten Jembrana sebanyak 3.072,75 ton.

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, perlu adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemberian bantuan berupa pupuk organik kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana.

Tabel 11.**Perbandingan IKU Persentase Penyediaan pupuk dengan Target Akhir RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase Penyediaan pupuk	ton	3.270	3.072,75	93,96		3.072,75	

1.4 Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani

Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani adalah prosentase jumlah kelompok tani yang mendapat binaan berbanding jumlah kelompok yang ada di Kabupaten Jembrana, dimana definisi kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian mengenai tujuan, motif dan minatnya, sehingga kelompok itu merupakan kelompok yang berakar kuat dan setiap anggotanya mempunyai rasa solidaritas yang tinggi dan kelembagaan kelompok dapat terbangun dengan baik.



Beberapa jenis pelatihan guna peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani di Kabupaten Jember diantaranya berupa pelatihan teknis budidaya sebesar 60 %, pelatihan dinamika kelompok 20 % dan pelatihan administrasi/pembukuan keuangan sebesar 15 %. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12.
Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Prosentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani	orang	120	105	87,5	150	130	86,6	180	158	87,7

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015 terjadi kenaikan 50,47 %, program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, Kegiatan Pekan Daerah / Pekan Nasional KTNA dan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani KTNA.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, masing masing kelompok memiliki aturan/awig-awig tentang masa jabatan pengurus, sehingga terjadi penggantian. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pembinaan dan pelatihan bagi kelompok secara berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani, baru tercapai sebesar 79,8 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 13.

Perbandingan IKU Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani	orang	180	158	87,7	198	158	79,8

Keberhasilan pencapaian IKU Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani didukung dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.008.650,- (72,03 %) dan realisasi fisik 85 %, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.991.350,- (27,97 %). Kegiatan Pekan Daerah / Pekan Nasional KTNA Pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.774.800,- (98,47%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 1.225.200,- (1,53 %). dan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani KTNA dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.407.800,- (72,04%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 5.592.200,- (27,96 %). Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14.

Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan Untuk Mendukung IKU Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Peningkatan Kesejahteraan Petani					
	- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.	25.000.000	85	18.008.650	72,03	6.991.350
	- Kegiatan Pekan Daerah KTNA Pagu anggaran	80.000.000	100	78.774.800	98,47	1.225.200



No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
	- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani KTNA	20.000.000	100	14.407.800	72,04	5.592.200
J U M L A H		125.000.000	95	111.191.250	88,95	13.808.750

1.5 Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Penyuluh

Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Penyuluh adalah prosentase jumlah penyuluh yang mendapat binaan berbanding jumlah penyuluh. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 15.
Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Prosentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh	orang	42	10	23,81	42	20	47,62	42	30	71,43

Program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian melalui Kegiatan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan dan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan pada Kelompok Tani Gapoktan, Petani, Penyuluh dan BPP Berprestasi

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh dan kelompok tani. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk mengadakan pelatihan-pelatihan berupa demplot kepada kelompok-kelompok di Kabupaten Jember. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Penyuluh, baru tercapai sebesar 71,43 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 16.
Perbandingan IKU Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Penyuluh dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Penyuluh	orang	42	30	71,43	42	30	71,43

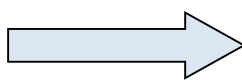
Keberhasilan pencapaian IKU Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Penyuluh didukung dengan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian melalui Kegiatan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunandengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.760.000,- (71,04%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.240.000,- (28,96 %) dan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan pada Kelompok Tani Gapoktan, Petani, Penyuluh dan BPP Berprestasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.107.600,- (90,36%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 2.892.400,- (9,64%). Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 17.
Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan Untuk Mendukung IKU Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Penyuluh.

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Fisik (%)	Realisasi		
				Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian - Kegiatan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	25.000.000	100	17.760.000	71,04	7.240.000
	- Kegiatan Pembinaan Kelembagaan pada Kelompok Tani Gapoktan, Petani, Penyuluh dan BPP Berprestasi	30.000.000	100	27.107.600	90,36	2.892.400
J U M L A H		55.000.000	100	44.867.600	81,58	10.132.400



Sasaran 2 :



Menurunnya Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian

Sasaran menurunnya serangan organisme pengganggu tanaman pertanian didukung dengan indikator kinerja utama, sebagai berikut :

2.1 Rasio lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida

Rasio lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida adalah kebutuhan penggunaan pestisida pada lahan yang terserang hama pengganggu tanaman. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 18.

Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Rasio lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida	Ha	-	721,5	-	-	143	-	-	566	-

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2014 mengalami penurunan rasio lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida sebesar 578,5 (80,18 %) dan tahun 2015 terjadi peningkatan rasio lahan terserang dengan penyediaan pestisida sebesar 413 (72,96 %)

Tabel 19.

Perbandingan IKU Rasio lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida dengan Target Akhir RPJMD.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Rasio lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida	Ha	-	566	-	-	566	-



2.2 Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit

Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit adalah prosentase jumlah kelompok tani yang dilatih berbanding jumlah kelompok tani/subak sawah. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 20.
Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit	%	84	67	79,76	84	24	28,57	-	-	

Adapun program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija kegiatan TP Propinsi APBN dengan Kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) dengan prosentase 2013 adalah 79,76 % dan tahun 2014 sebesar 28,57 % dan untuk Tahun 2015 tidak ada Program dan Kegiatan yang menunjang

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT). Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk melaksanakan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) kepada kelompok tani di Kabupaten Jember. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit, baru tercapai sebesar - %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 21.****Perbandingan IKU Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit dengan Target Akhir RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit	%	-	-	-	-	-	-

2.3 Prosentase Tingkat Serangan OPT Pertanian

Prosentase Tingkat Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pertanian adalah prosentase jumlah luas serangan hama dan penyakit berbanding luas tanam. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 22.**Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target (ha)	Realisasi (ha)		Target (ha)	Realisasi (ha)		Target (ha)	Realisasi (ha)	
Prosentase Tingkat Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pertanian	%	8.612	721,5	8,4	9.396	143	1,5	9.037	566	6,3

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015 terjadi peningkatan tingkat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) Pertanian sebesar 6,3% yang sebelumnya Tahun 2014 sebesar 1,5 % dan Tahun 2013 sebesar 8,4 %.

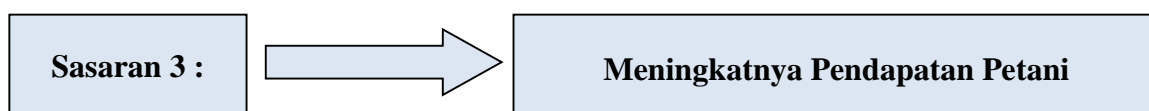
Faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan ini. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang hal ini. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase tingkat serangan Organisme Pengganggu



Tanaman (OPT) Pertanian baru tercapai sebesar 6,3 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 23.
Perbandingan IKUProsentase Tingkat Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pertanian dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target (ha)	Realisasi (ha)		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase Tingkat Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pertanian	%	9.037	566	6,3	9.037	566	6,3



Sasaran meningkatnya pendapatan petani didukung dengan indikator kinerja utama ,yaitu prosentase harga gabah perolehan petani sesuai dengan HET

Prosentase harga gabah perolehan petani sesuai dengan HET adalah prosentase hasil gabah yang dibeli dari penyosohan berbanding hasil luas panen. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 24.
Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
prosentase harga gabah perolehan petani sesuai dengan HET	%	-	-	-	-	-	-	3700	4200	113,51

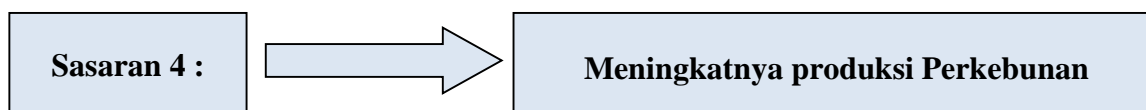
Berdasarkan realisasi pada tahun 2015 Harga Gabah dilapangan lebih besar dari harga pembelian pemerintah sesuai dengan Kepres No. 5 Tahun 2015 yaitu Harga diterima Petani Rp 4.200,- sedangkan Keppres Rp 3.700,-



Faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan ini. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang hal ini. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase harga gabah perolehan petani sesuai dengan HET tercapai sebesar 113,57 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 25.
Perbandingan IKU Prosentase Harga Gabah Perolehan Petani sesuai dengan HET dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Target (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)	
Prosentase harga gabah perolehan petani sesuai dengan HET	%	3.700	4.200	113,51	3.700	4.200	113,51



Sasaran meningkatnya produksi pekebunan didukung dengan 4 indikator kinerja utama, diantaranya sebagai berikut :

4.1 Produksi Tanaman perkebunan

Produksi Tanaman perkebunan adalah target dan realisasi selama 1 (satu) tahun. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 26.
Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Produksi tanaman perkebunan	ton	3.327,58	2.928,83	90,46	3.388,28	3.000,32	88,55	3.112,62	2.741,46	88,08



Berdasarkan perbandingan realisasi 2 tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015 terjadi penurunan 6,39 %, program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan dengan indikator tahun 2015 adalah jumlah kelompok tani yang mendapatkan good manufacture practice (GMP) sebanyak 20 Kelompok tani subak abian di kabupaten Jemberana dan kegiatan peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan dengan indikator tahun 2015 adalah meningkatnya produksi pertanian/perkebunan yang kegiatannya berupa pemberian bantuan sepeda motor sebanyak 50 unit kepada kelompok tani subak abian dan bantuan bibit kelapa sebanyak 4.550 pohon. Keterkaitan bantuan sepeda motor kepada Klian Subak Abian dengan produksi tanaman perkebunan tidak berbanding lurus, dimana dengan adanya bantuan fasilitas sepeda motor maka pengurus Subak Abian lebih Intensif didalam mencari informasi teknologi untuk peningkatan produksinya dan juga mendapatkan fasilitas permodalan untuk menunjang pembelian sarana produksi guna peningkatan produksinya. Pada tahun 2015 masih ada penurunan produksi tanaman perkebunan karena tanaman perkebunan melalui peremajaan masih belum menghasilkan, karena tanaman tersebut berumur 4-5 tahun baru mulai belajar berbuah, sehingga produksi tidak langsung meningkat.



Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan melalui bantuan benih kelapa dan bantuan sepeda motor kepada Subak Abian

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan produksi tanaman perkebunan. Solusi yang dilakukan antara lain



mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemberian bantuan berupa bibit kelapa, kakao, cengkeh, kopi dan tembakau kepada masyarakat di Kabupaten Jember. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Produksi Tanaman Perkebunan, baru tercapai sebesar 88,08%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 27.
Perbandingan IKU Produksi Tanaman Perkebunan dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2016	
Produksi Tanaman Perkebunan Kakao	ton	3.112,62	2.741,46	88,08	2.781,46	2.741,46	98,56
Produksi Tanaman Perkebunan Tembakau	ton	17,765	18,70	94,92	19,635	19.635	100

Keberhasilan pencapaian IKU Prosentase Produksi Tanaman Perkebunan didukung dengan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan melaksanakan kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau dengan pagu Rp.981.044.676,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 900.035.010,- (91,74%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 81.009.666,- (8,26 %) dan Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan dan melaksanakan Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan. Pagu anggaran sebesar Rp. 144.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 142.797.050,- (98,82%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 1.702.950,- (1,18 %) dan kegiatan peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan. Pagu anggaran sebesar Rp. 913.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 903.312.050,- (98,88%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 10.187.950,- (1,12 %). Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 28.
Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan
Untuk Mendukung IKU Produksi Tanaman Perkebunan

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	981.044.676	100	900.035.010	91,74	81.009.666
	- Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau	981.044.676	100	900.035.010	91,74	81.009.666
2.	Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	1058.000.000	100	1.046.109.100	98,87	11.890.900
	- Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan	144.500.000	100	142.797.050	98,82	1.702.950
	- Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan	913.500.000	100	903.312.050	98,88	10.187.950
J U M L A H		2.039.044.676	100	1.946.144.110	95,44	92.900.566



Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau di Desa Kaliakah

4.2 Prosentase Penyediaan Benih Unggul Perkebunan

Prosentase penyediaan benih unggul Perkebunan adalah prosentase jumlah benih unggul perkebunan berbanding luas tanam. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.



Tabel 29.

Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Prosentase penyediaan benih unggul Perkebunan .										
- Benih unggul Kakao	phn	0	0	0	803.250	275.000	34,23	0	0	0
- Benih unggul Kelapa	phn	10.000	1.000	10	10.000	4.550	45,5	127.295	30.000	23,56

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015 terjadi penurunan prosentase penyediaan benih unggul kakao 34,23 % dan kelapa 21,94 %, program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini tahun 2014 yaitu Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan Program peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan berkelanjutan, kegiatan peningkatan tanaman rempah dan penyegar dengan kegiatan PSP = 100 ha dgn 100.000 phn bibit tanaman kakao, kegiatan peremajaan kakao= 250 ha dgn 250.000 phn tanaman kakao, indikator tahun 2014 adalah tersaluranya bantuan benih unggul perkebunan berupa bibit kakao sebanyak 350.000 pohon kepada kelompok Tani/subak abian di 3 kecamatan di kabupaten Jembrana. Sedangkan untuk pengembangan kelapa genjah tahun 2013 seluas 10 ha dengan 1000 phn bibit kelapa genjah. Tahun 2014 seluas 45,5 ha dengan 4550 phn bibit kelapa genjah dan dan peremajaan kelapa dalam seluas 300 ha dengan 30.000 phn bibit kelapa dalam .

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu,keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemberian bantuan berupa benih unggul perkebunan kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana . Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase Penyediaan Benih Unggul Perkebunan , baru tercapai sebesar 23,56%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 30.****Perbandingan IKU Persentase Penyediaan Benih Unggul perkebunan dengan Target Akhir RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase penyediaan benih unggul Perkebunan							
- Benih unggul Kakao	phn	0	0	0	0	0	0
- Benih Unggul perkebunan Kelapa	phn	1.272,95	30.000	23,56	1.272,95	30.000	23,56

Keberhasilan pencapaian IKU Prosentase Penyediaan Benih Unggul Perkebunan pada tahun 2015 ada kegiatan peremajaan tanaman perkebunan kelapa dalam seluas 300 ha kegiatan TP. 05 Ditjen Perkebunan dari target 1.272,95 ha . Sehingga penyediaan benih unggul perkebunan kelapa hanya tercapai 23,56 % . , di kabupaten Jembrana belum dianggarkan.

4.3 Prosentase Penyediaan Pupuk

Prosentase penyediaan pupuk adalah prosentase realisasi pemakaian pupuk berbanding sasaran lokasi pupuk (SK.Bupati) .Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 31.**Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Prosentase penyediaan pupuk	kg	135.000	135.000	100	80.000	80.000	100	45.000	45.000	100

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015 sudah tercapai 100 % , Program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini bersumber dari anggaran APBD Kabupaten, dengan indikator tahun 2015 adalah 45.000 kg yang tersebar pada 22 kelompok Tani / subak Abian pada 5 kecamatan di kabupaten Jembrana.



Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemberian bantuan berupa pupuk organik kepada masyarakat di Kabupaten Jember. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase Penyediaan pupuk sudah tercapai 100 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 32.
Perbandingan IKU Persentase Penyediaan pupuk dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase Penyediaan pupuk	kg	45.000	45.000	100	45.000	45.000	100

Keberhasilan pencapaian IKU Prosentase Penyediaan pupuk didukung dengan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Penyediaan Sarana produksi Pertanian/Perkebunan Pagu anggaran sebesar Rp.144.500. dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 142.797.050. (98,82%) dan realisasi fisik 100 %, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 1.702.950. (1,18 %). Adapun program dan kegiatan adalah sebagai berikut Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian /Perkebunan. Sbb. :

Tabel 33.
Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan Untuk Mendukung IKU Persentase Penyediaan Pupuk

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan					
	- Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan	144.500.000	100	142.797.050	98,82	1.702.950
J U M L A H		144.500.000	100	142.797.050	98,82	1.702.950



4.4 Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani Perkebunan

Prosentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani perkebunan adalah prosentase jumlah kelompok petani kebun yang mendapat binaan berbanding jumlah kelompok kebun. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 34.

Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Prosentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani kebun	org	170	170	100	370	370	100	898	898	100

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015 sudah terrealisasi 100 %, program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan petani melalui Kegiatan SLPHT Kakao Petani Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan melalui Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar.



Kegiatan SLPHT di Kecamatan Mendoyo



Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk peningkatan SDM kepada masyarakat pekebun di Kabupaten Jember. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani kebun baru tercapai sebesar 36 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 35.
Perbandingan IKU Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani Kebun dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani kebun	org	898	898	100	900	898	99,77

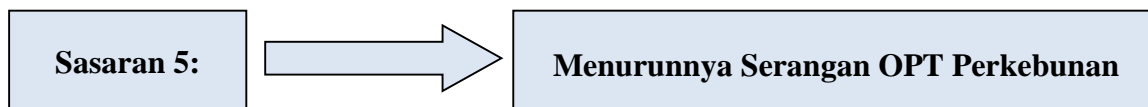
Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani kebun didukung dengan Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (Dana TP), Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (APBD Kabupaten), Program Peningkatan Kesejahteraan petani, Kegiatan SLPHT Kakao Petani Perkebunan dengan pagu anggaran sebesar Rp.306.000.608,20. dengan realisasi keuangan sebesar Rp 301.818.020,- (98,82 %) dan realisasi fisik 100 %, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.182.588 (1,97 %). Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 36.

**Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan
Untuk Mendukung IKU Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani.**

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Peningkatan Kesejahteraan Petani					
	- Kegiatan SLPHT Kakao Petani Perkebunan	306.000.608,20	100	301.818.020	98,03	4.182.588,20
2.	Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan					
	- Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan	144.500.000	100	142.797.050	98,82	1.702.950
J U M L A H		450.500.608,206	100	444.615.070	98,42	5.885.538,20



Sasaran menurunnya OPT Perkebunan didukung dengan 3 indikator kinerja utama diantaranya sebagai berikut :

5.1 Rasio Lahan Yang Terserang dengan penyediaan pestisida

Rasio Lahan Yang Terserang dengan penyediaan pestisida adalah rasio lahan yang terserang dengan penyediaan pestisida selama 1 (satu) tahun .Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 37.****Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Rasio Lahan Yang Terserang dengan penyediaan pestisida	Ha	8	2	25	52	18	34,61	34	18	52,94

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015 terjadi kenaikan 88,88 %, program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan Kegiatan SL-PHT Kakao Petani Perkebunan dengan indikator tahun 2015 adalah jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan Pestisida adalah 18 kelompok tani / subak abian di kabupaten Jembrana

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tabel 38.**Perbandingan IKU Rasio Lahan Yang Terserang dengan penyediaan pestisida dengan Target Akhir RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi Tahun 2015	%
Rasio Lahan Yang Terserang dengan penyediaan pestisida	Ha	34	18	52,94	16	18	112,5

Keberhasilan pencapaian IKU Prosentase Rasio Lahan Yang Terserang dengan penyediaan pestisida didukung dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petanidan melaksanakan Kegiatan SL-PHT Kakao Petani Perkebunan Pagu anggaran sebesar Rp 306.000.608,20,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 301.818.020,- (98,63 %) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran



sebesar Rp 4.182.588,20,- (1,37 %) Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 39.
Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan
Untuk Mendukung IKU Rasio Lahan Yang Terserang dengan penyediaan pestisida

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Peningkatan Kesejahteraan Petani - Kegiatan SLPHT Kakao Petani Perkebunan	306.000.608,20	100	301.818.020	98,03	4.182.588,20
J U M L A H		306.000.608,20	100	301.818.020	98,03	4.182.588,20

5.2 Prosentase kelompok perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit

Prosentase kelompok perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit adalah prosentase jumlah kelompok tani yang dilatih berbanding jumlah kelompok tani/subak abian. untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 40.
Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
		Prosentase kelompok perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit	kelompok	8	8	100	8	8	100	6

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015 telah mencapai 100 %, program dan kegiatan yang menunjang



kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dengan indikator tahun 2015 adalah jumlah kelompok tani /subak abian yang mendapat kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT).

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) guna meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam menanggulangi serangan hama. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase kelompok perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit, baru tercapai sebesar 100%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 41.
Perbandingan IKU Prosentase kelompok perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase kelompok perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit	kelompok	6	6	100	6	6	100

Keberhasilan pencapaian IKU Prosentase kelompok perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit didukung dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan melaksanakan Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Pagu anggaran sebesar Rp 306.000.608,20,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 301.818.020,- (98,63 %) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp.4.182.588,20,- (1,37%) Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 42.****Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan Untuk Mendukung IKU Prosentase kelompok perkebunan yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit**

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Peningkatan Kesejahteraan Petani - Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	306.000.608,20	100	301.818.020	98,63	4.182.588,20
J U M L A H		306.000.608,20	100	301.818.020	98,63	4.182.588,20

5.3 Prosentase Tingkat Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan

Prosentase Tingkat Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan adalah prosentase jumlah luas serangan hama dan penyakit berbanding luas tanam. untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 43.**Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
		Prosentase Tingkat Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	ha	40	10	25	55	16	29,09	35

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015 terjadi kenaikan 37,50 %, program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan Kegiatan SL-PHT Kakao Petani Perkebunandengan indikator tahun 2015 adalah jumlah kelompok tani /subak abian yang mendapat kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT).



Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kakao Petani Perkebunan guna meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam menanggulangi serangan hama dan penyakit. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase tingkat serangan OPT Perkebunan sebesar 45,71 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 44.
Perbandingan IKU Prosentase Tingkat Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan dengan Target Akhir RPJMD

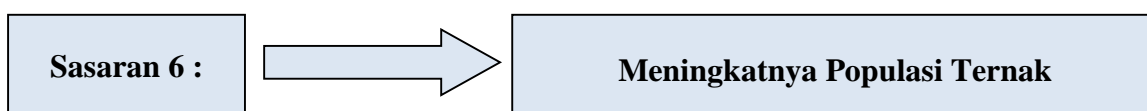
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase Tingkat Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	ha	35	16	45,71	26	16	61,53

Keberhasilan pencapaian IKU Prosentase Prosentase Tingkat Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan didukung dengan Program Peningkatan kesejahteraan Petani dan melaksanakan Kegiatan SL-PHT Kakao Petani Perkebunan, Pagu anggaran sebesar Rp 306.000.608.20,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 301.818.020,- (98,63%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp 4.182.588,20,- (1,37 %) Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 45.
Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan
Untuk Mendukung IKU

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Peningkatan Kesejahteraan Petani - Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	306.000.608,20	100	301.818.020	98,63	4.182.588,20
J U M L A H		306.000.608,20	100	301.818.020	98,63	4.182.588,20



Meningkatnya populasi ternak didukung dengan 3 indikator utama diantaranya sebagai berikut :

6.1 Prosentase peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan

Prosentase peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan adalah prosentase hasil Inseminasi Buatan berbanding jumlah populasi ternak untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya

Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun, adapun target dan realisasi sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 46.****Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
		Prosentase peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi	ekor	3.000	2.037	67,9	3.050	1.815	59,5	3.100

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015 terjadi penurunan 10,89 %, program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat dengan indikator tahun 2015 adalah terwujudnya penyebaran bibit ternak sapi di kelompok masyarakat dan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan indikator tahun 2015 adalah meningkatnya populasi ternak.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok ternak unggulan, dalam terlaksananya peningkatan produktivitas ternak unggulan dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan potensi produktivitas ternak unggulan di wilayah kelompok ternak unggulan dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan produktivitas ternak unggulan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan, baru tercapai sebesar 73,7 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 47.**Perbandingan IKU Prosentase peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi dengan Target Akhir RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi	ekor	3.100	2.286	73,7	3.100	2.286	73,7



Keberhasilan pencapaian IKU ProsentaseProsentase peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi didukung denganProgram Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan melaksanakan KegiatanPendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat denganPagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.716.719,- (97,17 %) dan realisasi fisik 100%,sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 283.281,- (2,83 %)dan Kegiatan Agribisnis Peternakdengan Pagu anggaran sebesar Rp. 1.172.485.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.023.644.897,-(87,31 %) dan realisasi fisik 100%,sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 148.840.103,- (2,69 %) Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 48.
Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan
Untuk Mendukung IKU

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					
	-Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	10.000.000	100	9.716.719	97,17	283.281
	-Kegiatan Agribisnis Peternakan	1.172.485.000	100	1.023.644.897	87,31	148.840.103
J U M L A H		1.182.485.000	100	1.033.361.616	87,39	149.123.384



Kegiatan Agribisnis Peternakan Desa Pangyangan



6.2 Prosentase Peningkatan Kelompok Tani Ternak

Prosentase Peningkatan kelompok Tani ternak adalah prosentase jumlah kelompok peternak tahun ini dikurangi tahun lalu berbanding jumlah kelompok tahun lalu untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 49.
Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Prosentase Peningkatan Kelompok Tani Ternak	klp	0	427	472

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015 terjadi kenaikan 10,53%, program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna dengan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna dengan indikator tahun 2015 adalah terlaksananya penerapan teknologi tepat guna.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain adanya, komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok ternak unggulan, dalam terlaksananya peningkatan produktivitas ternak unggulan dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan potensi produktivitas ternak unggulan di wilayah kelompok ternak unggulan dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan produktivitas ternak unggulan.

Keberhasilan pencapaian IKU Prosentase Peningkatan Kelompok Tani Ternak didukung dengan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna dan melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna. Pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.377.650,- (93,78 %) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp.622.350,- (6,22 %) Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 50.

**Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan
Untuk Mendukung IKU**

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna - Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	10.000.000	100	9.377.650	93,78	622.350
J U M L A H		10.000.000	100	9.377.650	93,78	622.350

6.3 Prosentase Peningkatan Usaha Peternakan

Prosentase Peningkatan Usaha Peternakan adalah prosentase jumlah Usaha Peternakan tahun ini dikurangi tahun lalu berbanding jumlah Usaha Peternakan tahun lalu untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 51.

Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Prosentase Peningkatan Usaha Peternakan	buah	0	299	299

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015, tidak terjadi kenaikan/penurunan, program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, belum ada.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang belum disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran.



6.4 Prosentase Kelompok yang dilatih dalam teknologi tepat guna bidang peternakan

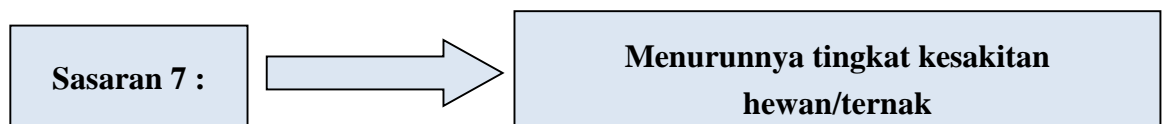
Prosentase Kelompok yang dilatih dalam teknologi tepat guna bidang peternakan adalah prosentase Jumlah Kelompok yang dilatih dalam teknologi tepat guna bidang peternakan tahun ini dikurangi tahun lalu berbanding jumlah Kelompok yang dilatih dalam teknologi tepat guna bidang peternakan tahun lalu untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 52.
Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Prosentase Kelompok yang dilatih dalam teknologi tepat guna bidang peternakan	buah	0	299	299

Berdasarkan perbandingan realisasi beberapa tahun terakhir tersebut diatas, pada tahun 2015, tidak terjadi kenaikan/penurunan, program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, belum ada.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang belum disediakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran.



Menurunnya tingkat kesakitan ternak /hewan dengan indikator utama Prosentase Peningkatan Jumlah Vaksinasi Hewan/Ternak adalah prosentase jumlah ternak/hewan yang mendapat vaksinasi berbanding populasi untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.



Tabel 53.

Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Prosentase menurunnya tingkat kesakitan ternak	%	35,2	29,1	30,6

Program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dengan indikator tahun 2015 adalah meningkatnya kesehatan hewan/ternak dan kesehatan lingkungan.

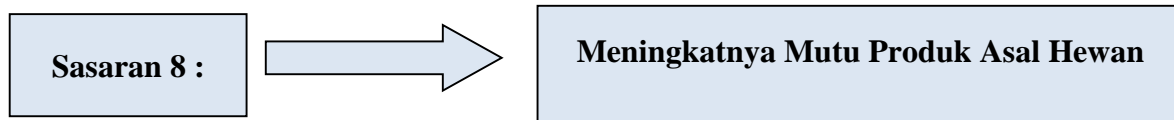
Faktor-faktor penunjang keberhasilan antara lain meningkatnya kesehatan ternak dan adanya dukungan dari masyarakat pemilik hewan, dalam terlaksananya Peningkatan kesehatan ternak dan peran serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana menyediakan obat-obatan untuk ternak. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk mencegah penyakit menular dan harus melibatkan pihak ketiga yang berkaitan dengan terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular ternak.

Keberhasilan pencapaian IKU Prosentase Prosentase menurunnya tingkat kesakitan ternak didukung dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. Pagu anggaran sebesar Rp.152.780.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 152.165.505,- (99,60 %) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. 614.495,- (0,40 %) Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 54.

Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan Untuk Mendukung IKU

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak - Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	152.780.000	100	152.165.505	99,60	614.495
J U M L A H		152.780.000	100	152.165.505	99,60	614.495



Meningkatnya Mutu Produk Asal Hewan didukung dengan 3 indikator utama diantaranya sebagai berikut :

8.1 Prosentase peningkatan pemeriksaan produk asal hewan di pasar

Prosentase peningkatan pemeriksaan produk asal hewan di pasar adalah prosentase jumlah pemeriksaan produk asal hewan di pasar tahun sekarang dikurangi dengan jumlah pemeriksaan produk asal hewan di pasar tahun sebelumnya berbanding dengan jumlah pemeriksaan produk asal hewan di pasar tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 55.

Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Prosentase peningkatan pemeriksaan produk asal hewan di pasar	%	-	4	-	-	4	-	-	4	-

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit, baru tercapai sebesar - %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 56.

Perbandingan IKU Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015			%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi	Target		Realisasi Tahun 2015		
Prosentase peningkatan pemeriksaan produk asal hewan di pasar	%	-	4	-	-	4	-	

8.2 Prosentase peningkatan pemeriksaan antomorten dan postmortem pada RPH



Pemeriksaan antemortem dan postmortem di Kabupaten Jember dilaksanakan pada ternak sapi, dimana pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan pada setiap ekor sapi yang akan dipotong.

Pemeriksaan ante mortem dilakukan dengan mengamati dan mencatat ternak sapi sebelum disembelih yang meliputi jumlah ternak, jenis kelamin, keadaan umum, serta kelainan yang tampak.

Hasil akhir pemeriksaan ini dapat dibagi tiga kelompok :

1. Ternak yang dipotong secara regular adalah ternak yang memenuhi syarat normal.
2. Ternak yang ditolak adalah ternak yang menderita suatu penyakit menular betina, masih produktif dan betina bunting.
3. Ternak yang menderita kelainan lokal seperti fraktur, abses, neoplasma, dan ternak yang kondisinya meragukan.

Pemeriksaan daging post mortem adalah pemeriksaan kesehatan daging setelah dipotong terutama pada pemeriksaan karkas, kelenjar limfe, kepala bagian mulut, lidah, bibir, dan otot masseter dan pemeriksaan paru-paru, jantung, ginjal, hati, serta limpa. Maksud dilakukan pemeriksaan ini adalah membuang dan mendeteksi bagian yang abnormal serta pengawasan apabila ada pencemaran oleh kuman yang berbahaya, untuk memberikan jaminan bahwa yang diedarkan masih layak untuk dikonsumsi.

Pemeriksaan post-mortem yang dilakukan antara lain pemeriksaan karkas pada limfoglandula, pemeriksaan kepala yaitu pada bibir, mulut, otot masseter, dan pemeriksaan organ dalam seperti paru-paru, jantung, ginjal, hati, serta limpa. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan dengan intensitas normal setiap hari.

Prosentase peningkatan pemeriksaan antemortem dan postmortem pada RPH adalah prosentase jumlah pemeriksaan antemortem dan postmortem pada RPH tahun sekarang dikurangi dengan jumlah pemeriksaan antemortem dan postmortem pada RPH tahun sebelumnya berbanding dengan pemeriksaan antemortem dan postmortem pada RPH tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.



Tabel 57.

Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Prosentase peningkatan pemeriksaan antomorten dan postmortem pada RPH	%	-	2.628	-	-	2.116	-	-	2.121	-

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit, baru tercapai sebesar - %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 58.

Perbandingan IKU Prosentase peningkatan pemeriksaan produk asal hewan di pasar dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase peningkatan pemeriksaan antomorten dan postmortem pada RPH	%	-	2.121	-	-	1.121	-

8.3 Prosentase pengawasan obat hewan

Prosentase pengawasan obat hewan adalah prosentase jumlah pengawasan obat hewan tahun sekarang dikurangi dengan jumlah pengawasan obat hewan tahun sebelumnya berbanding dengan pengawasan obat hewan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 59.

Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013		%	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Prosentase pengawasan obat hewan	%	-	4	-	-	4	-	-	4	-

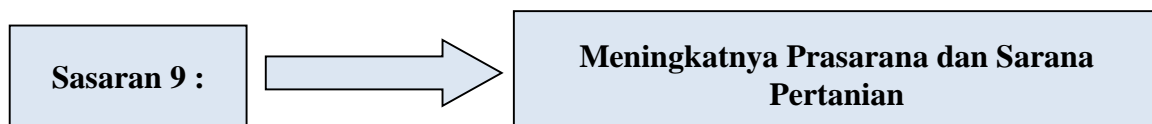


Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2016, Prosentase Kelompok Pertanian yang dilatih dalam pengendalian serangan penyakit, baru tercapai sebesar - %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 60.

Perbandingan IKU Prosentase Pengawasan Obat Hewan dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016 (Akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi Tahun 2015	
Prosentase pengawasan obat hewan	%	-	4	-	-	4	-



Meningkatnya prasarana dan sarana pertanian dengan indikator utama Penyediaan Infrastruktur dan alat mesin pertanian adalah data infrastruktur dan alat mesin pada tahun berkenaan untuk lebih jelasnya capaian Indikator Kinerja Utama tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 61.

Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Penyediaan Infrastruktur dan alat mesin pertanian	Unit/paket			30,6
- Jalan Usaha Tani	paket	20	18	15
- JITUT	paket	18	21	40
- Dam Parit	unit	5	6	13
- Sumur Bor	unit	-	-	23
- Traktor	unit	4	44	37
- Pompa	unit	5	28	95
- Transplanter	unit	-	3	4

Program dan kegiatan yang menunjang kegiatan ini, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan Kegiatan DAK Pertanian untuk



pembenihan, ketahanan pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan dengan ketersediaan prasarana dan sarana dan kegiatan DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian dengan indikator tahun 2015 peningkatan produksi hasil pertanian dalam rangka pencapaian swasembada pangan .

Faktor-faktor penunjang keberhasilan meningkatnya infrastruktur pertanian guna mendukung pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditi pertanian strategis adalah komitmen pimpinan dan adanya dukungan dari masyarakat serta pihak terkait yang sangat diharapkan. Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan yaitu keterbatasan dana dalam peningkatan infrastruktur pertanian. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk menambah dan perbaikan infrastruktur

Keberhasilan pencapaian IKU Penyediaan Infrastruktur dan alat mesin pertanian didukung dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dan melaksanakan Kegiatan DAK Pertanian untuk pembenihan, ketahanan pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan. Pagu anggaran sebesar Rp. 5.909.661.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.203.430.150,- (88,05%) dan realisasi fisik 88,29 %, dengan salah satu kegiatan berupa pembangunan irigasi air tanah sebanyak 1 paket dan kegiatan DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian Pagu anggaran sebesar Rp. 11.837.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.772.437.896,- (99,45%) dan realisasi fisik 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 64.762.104,- (0,55 %) Adapun program/kegiatan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 62.
Realisasi Keuangan dan Fisik Program / Kegiatan
Untuk Mendukung IKU

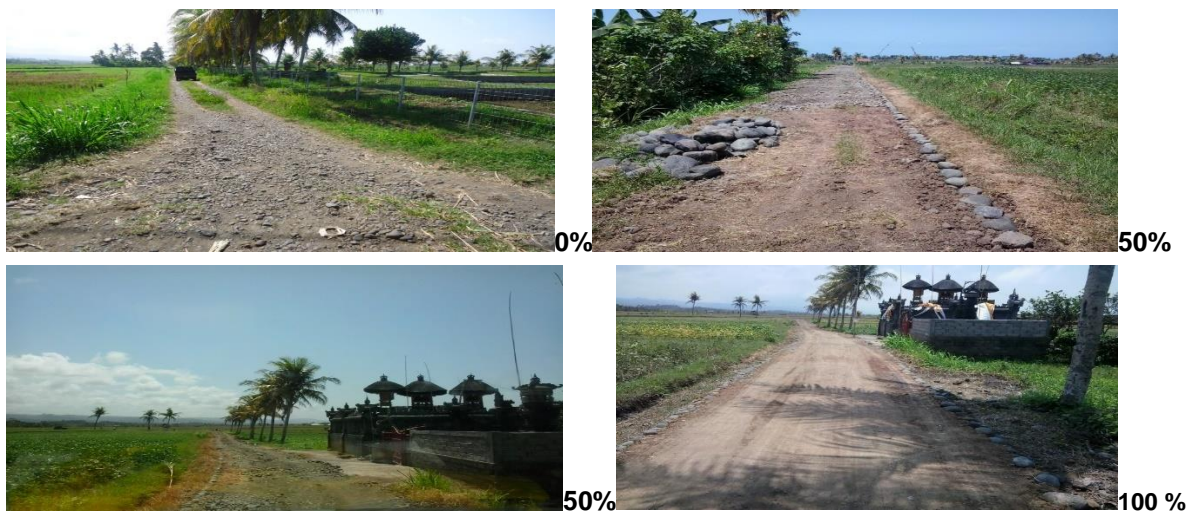
No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan - Kegiatan DAK Pertanian untuk pembenihan, ketahanan pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan	5.909.661.000	88,29	5.203.430.150	88,05	706.230.850
	- DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian	11.837.200.000	100	11.772.437.896	99,45	64.762.104



No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi			
			Fisik (%)	Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				Rp.	%	
J U M L A H		17.746.861.000	100	16.975.868.046	99,60	770.992.954



Pekerjaan Pembuatan Dam Parit



Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani



3.2 REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jemberana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jemberana yang telah tertuang dalam DPA dan sudah menjadi penetapan kinerja masing-masing Bidang dibawahnya sebesar Rp. **23.172.555.284,20** dengan realisasi Rp. **22.029.709.456,00** atau dengan serapan dana mencapai **95,07 %**. Dengan pencapaian sebesar tersebut dapat dikatakan bahwa Tahun 2015 cukup baik dengan kondisi anggaran terakhir adalah SILPA sebesar Rp. **1.142.845.828,20**. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 63.
Realisasi Keuangan APBD Tahun 2015

O	URAIAN	ANGGARAN APBD (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN (RP.)	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	19.302.245.000,00	18.430.783.705,00	871.461.295	5,49
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	431.000.608,20	413.009.270,00	17.991.338,20	5,83
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan	981.044.676,00	900.035.010,00	81.009.666,00	1,74
	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	1.058.000.000,00	1.046.109.100,00	11.890.900,00	8,88
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	55.000.000,00	44.867.600,00	10.132.400,00	1,58
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	152.780.000,00	152.165.505,00	614.495,00	9,60
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.182.485.000,00	1.033.361.616,00	149.123.384,00	7,39
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	10.000.000,00	9.377.650,00	622.350,00	3,78
	JUMLAH	23.172.555.284,20	22.029.709.456,00	1.142.845.828,00	5,07



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam perjanjian kinerja tahun 2015, terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis yang diperjanjikan, yaitu: (1) Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan; (2) Menurunnya serangan OPT Pertanian melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan; (3) Meningkatnya Pendapatan Petani dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; (4) Meningkatnya Produksi Perkebunan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; (5) Menurunnya serangan OPT Perkebunan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; (6) Meningkatnya Populasi Ternak dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna; (7) Menurunnya Tingkat Kesakitan Hewan/ternak; (8) Meningkatnya mutu produk asal hewan dan (9) Meningkatnya Prasarana dan sarana pertanian, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan .

Berdasarkan atas hasil pengukuran kinerja analisis dan evaluasi pencapaian sasaran, secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember telah berhasil mencapai sasaran tersebut, tetapi masih ada permasalahan dan kendala berkaitan dengan peningkatan kinerja. Dalam mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan / kendala yang terjadi, dilaksanakan upaya langkah-langkah pemecahan masalah. Kendala dan langkah-langkah pemecahan masalah secara terinci telah diuraikan pada Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang sekaligus merupakan bahan renungan untuk lebih meningkatkan kinerja instansi pada tahun berikutnya. Keberhasilan yang dicapai diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, demikian pula kegagalan yang dialami dalam pelaksanaannya dapat diperbaiki dan disempurnakan pada tahun berikutnya.

4.2 SARAN-SARAN

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut diatas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Untuk mengatasi permasalahan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember adalah dengan meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder*.